BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

2025

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, 55812 ☎ (0274) 391 537
kesbangpol@gunungkidulkab.go.id kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,

Drs. Wahyu Nugroho, M.Si
NIP. 196808291989031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik Masyarakat”

   Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul diukur indikator Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat. Dengan target sebesar 100% dan capaian di tahun 2025 sebesar 100%, maka tujuan sudah tercapai 100 persen.

2. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan indikator meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat”:

- Diukur dengan indikator konflik sosial yang tertangani.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; serta Program Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; pada tahun 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Target capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD diukur dengan Nilai AKIP Bakesbangpol Tahun n-1, yaitu Nilai AKIP 2024. Capaian Nilai AKIP sesuai LHE AKIP internal 2024, sebesar 80,2. Dengan target yang ditetapkan sebesar 80,20 terealisasi 83,26 sehingga capaian kinerja sebesar 103,82%. Dengan demikian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 82,55% terjadi peningkatan sebesar 0,71%.
- Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu 82,55 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran telah terlaksana dengan baik.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi;
2. Belum kuatnya peran dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul sehingga menyebabkan belum optimalnya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Gunungkidul, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di

kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten;

3. Semakin meningkatnya kebebasan Publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpeluang menjadi konflik sosial di masyarakat;
4. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), sehingga Muncul Apllikasi Pinjaman online dan Judi online di Handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat dapat terjerat hutang dan menjadi pemicu konflik sosial;
5. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan seperti misalnya Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, yang mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan organisasi kemasyarakatan kurang optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah 2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 3
D. Tugas dan Fungsi 5
E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) 7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran 8
BAB II 12
PERENCANAAN KINERJA 12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 12
B. Strategi dan Arah Kebijakan 13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 20
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 22
BAB III 27
AKUNTABILITAS KINERJA 27
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 27
B. Capaian Kinerja Lainnya 56
C. Efisiensi Anggaran 56
D. Inovasi 61
BAB IV 64
PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Langkah Perbaikan Kinerja 65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 8
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 9
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025 10
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026 13
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 13
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 15
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 20
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 21
Tabel II.6 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 22
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 27
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 28
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 28
Tabel III.4 Capaian Sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat 29
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 30
Tabel III.6 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis 31
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 33
Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat 34
Tabel III.9 Kegiatan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2025 35
Tabel III.10 Kegiatan P4GN Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2024 36
Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2025 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja 3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunugkidul 5
Gambar II.1. E-SAKIP 23
Gambar II.2. Sipanda 24
Gambar II.3. Siapgaspol 25
Gambar II.4. kesbangpol.gunungkidulkab.go.id 26
Gambar II.5. Instagram kesbang.gk 26
Gambar III.2 Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul 32
Gambar. III.3 Anggota Korsik Kabupaten Gunungkidul mengiringi upacara 39
Gambar. III.4 Forum Gabungan Perangkat Daerah 39
dengan urusan pemerintahan umum 39
Gambar. III.5 Rakor Pendataan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 40
Gambar. III.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi PPI Kabupaten Gunungkidul ... 41
Gambar. III.8 Pendidikan Politik Bersama Pemilih Pemula 42
Gambar. III.9 Pendidikan Politik Masyarakat 42
Gambar. III.10 Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah 43
Gambar. III.11 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. 43
Gambar. III.12 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul. 44
Gambar. III.13 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul. 44
Gambar. III.14 Aubade Paskibraka Kab. Gunungkidul. 45
Gambar. III.15 Pembukaan desa bahagia Paskibraka Kab. Gunungkidul. 46
Gambar. III.16 Latihan Paskibraka Kab. Gunungkidul. 46
Gambar. III.18 Pengibaran Bendera dan penuruna Bendera Upacara 17 Agustus oleh Paskibraka Kab. Gunungkidul 47
Gambar. III.19 Ramah Tamah paskibraka bersama gubernur DIY 47
Gambar. III.20 Kemitraan Pembinaan Ormas 48
Gambar. III.21 Pengembaraan Kebangsaan 48
Gambar. III.22 Sekolah penggerak Kerukunan 49
Gambar. III.24 Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 54
Gambar. III.26 Sekolah Penggerak Kerukunan Kabupaten Gunungkidul 63

BAB I berisi:

A. Latar Belakang
B. Cascading Kinerja
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

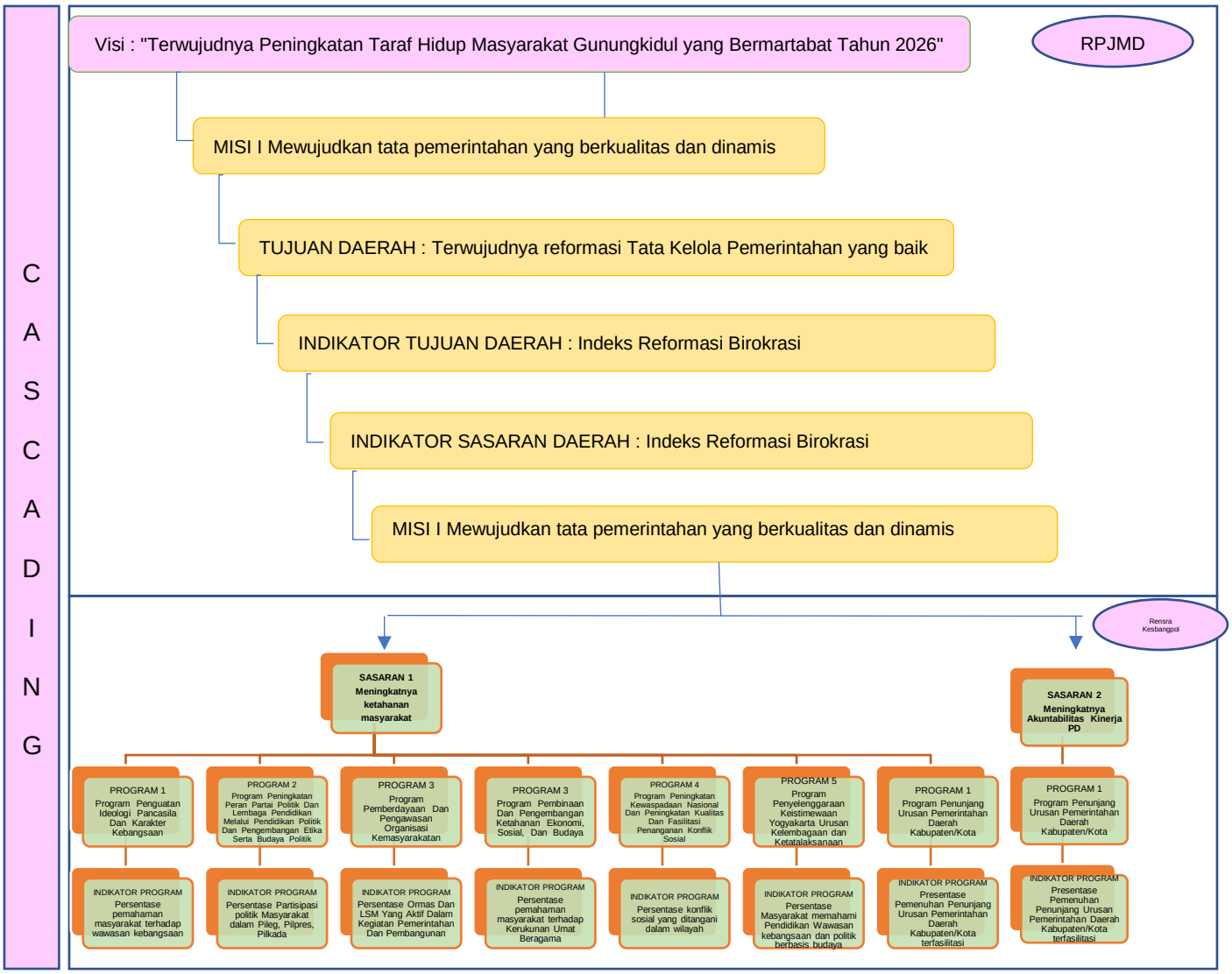

Gambar I.1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

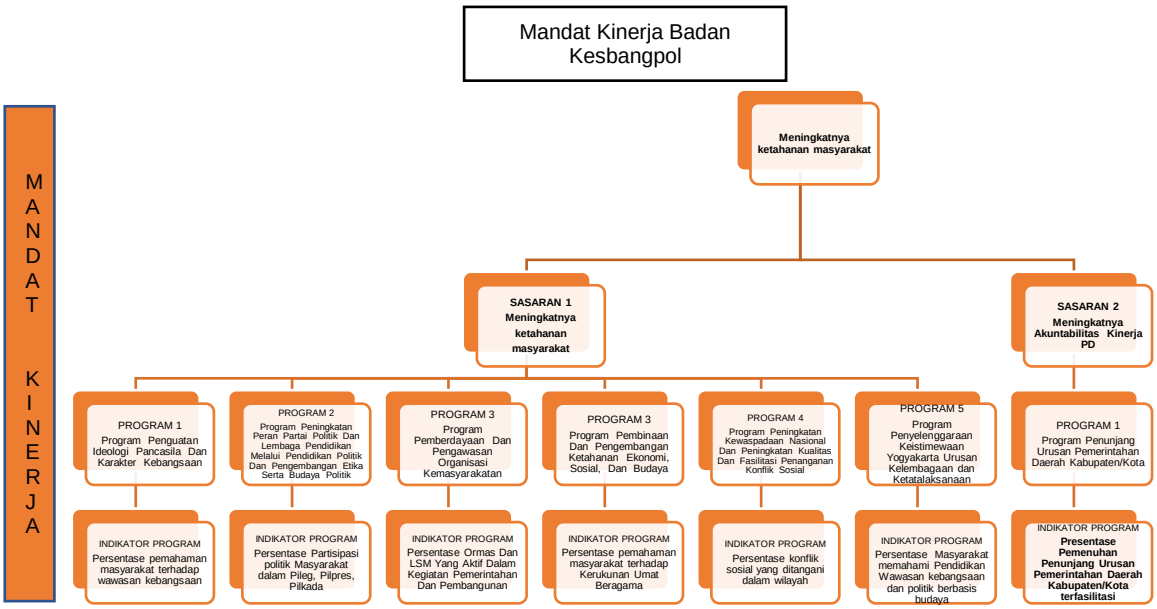

Peta Proses Bisnis

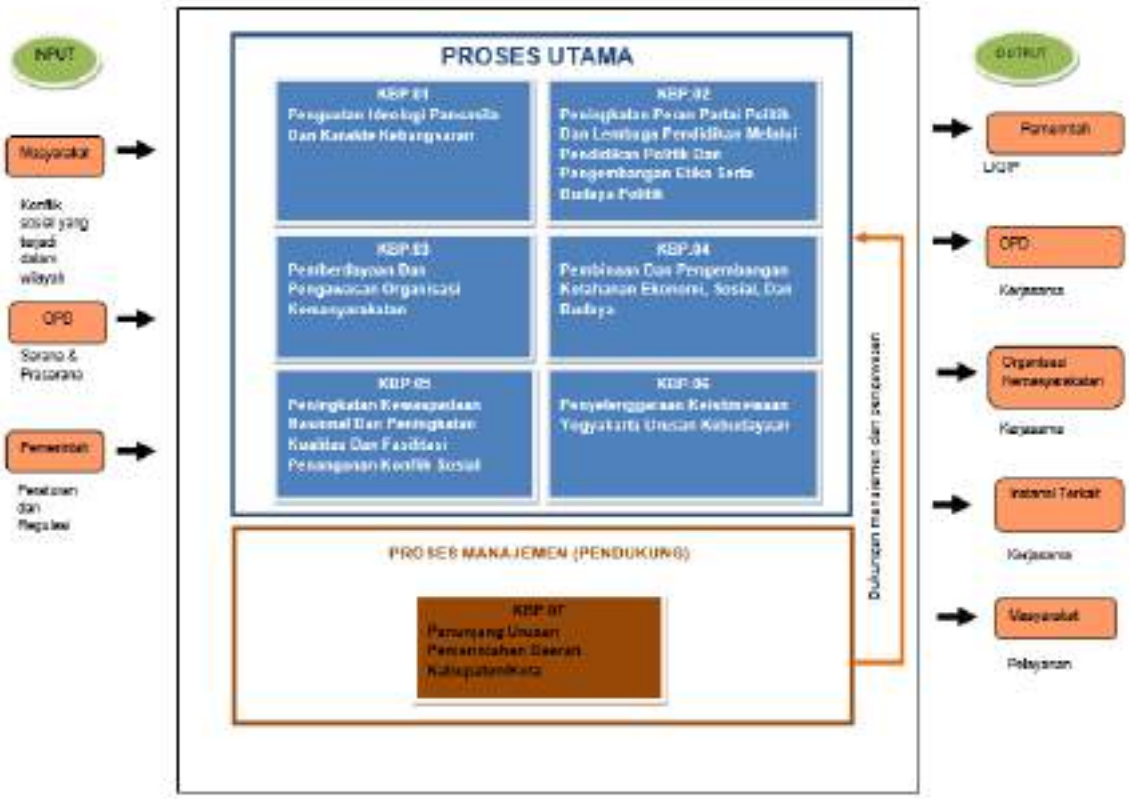

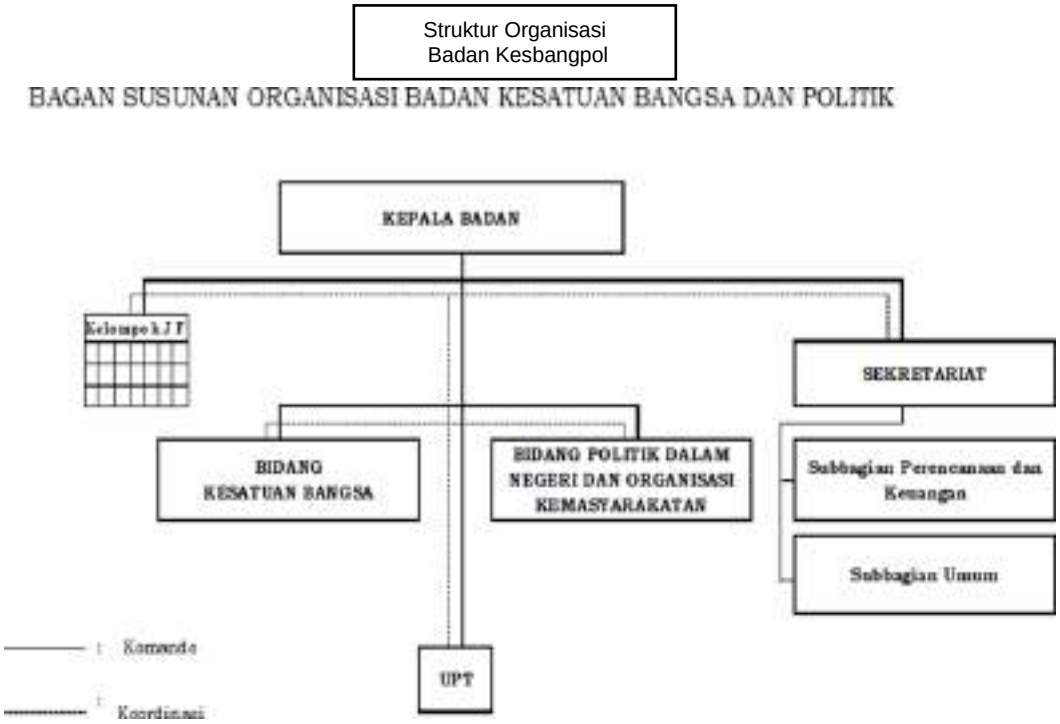

Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunugkidul

D. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rencana kineria dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragarna, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
8. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
9. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;

10. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan Bangsa dan Politik; dan
12. Pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negatif modernisasi dan dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi
2. Belum kuatnya peran dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul sehingga menyebabkan belum optimalnya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Gunungkidul, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten.
3. Menurunnya rasa cinta tanah air;
4. Semakin meningkatnya kebebasan Publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpeluang menjadi konflik sosial di masyarakat
5. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), sehingga Muncul Apllikasi Pinjaman online dan Judi

online di Handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat dapat terjerat hutang dan menjadi pemicu konflik sosial

6. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti misalnya Undang –undang no 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang –undang Nomor 16 Tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan ormas kurang optimal.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6				7	8
A.	**Jabatan Pimpinan Tinggi**	**1**	**S2**				**1**	**1**				**1**	
B.	**Jabatan Administrasi**	**15**					**13**	**3**	**5**	**4**		**5**	**10**
	1. Administrator	3	S2				1	3				2	1
	2. Pengawas	2	S2	S1			2		1	1			2
	3.Pelaksana	10		S1	D3	SMA	10		4	3	2	3	7
C.	**Jabatan Fungsional**	**6**	S2	S1	S1		**6**	**1**	**3**	**1**		**1**	**4**
	Jumlah	**21**					**21**	**5**	**8**	**6**	**2**	**7**	**14**

Sumber: Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (38,09%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak

5 orang (23,80%), D3 6 orang (28,57%), SMA 2 orang (9,52%). Komposisi pegawai perempuan (66,66%) lebih banyak dibanding pegawai laki-laki (33,33%); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 21 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 16 pejabat pelaksana administratif. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbagian 2 yang menangani 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan untuk optimalisasi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Alat-alat Angkutan Aset Tetap	11 unit	548.125.351,56
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	228 unit	347.554.023,00
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20 unit	54.889.054,00
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	7 buku	435.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	34 buah	183.090.150,00
	Jumlah		*1.134.093.579*

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, dan 9 (Sembilam) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	1	2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Pendapatan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5			**BELANJA DAERAH**	**6.135.460.575,00**	**5.991.064.575,00**	**(144.396.000,00)**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**6.135.460.575,00**	**5.921.524.575,00**	**(213.936.000,00)**
5	1	1	Belanja Pegawai	1.672.018.741,00	1.672.018.741,00	**0,00**
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	3.286.148.094,00	3.072.212.094,00	**(213.936.000,00)**
5	1	5	Belanja Hibah	1.177.293.740,00	1.177.293.740,00	**0,00**
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**0,00**	**69.540.000,00**	**69.540.000,00**
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	69.540.000,00	69.540.000,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Belanja	6.135.460.575,00	5.991.064.575,00	
			Total Surplus/(Defisit)	**(6.135.460.575,00)**	**(5.991.064.575,00)**	
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	0,00	0,00	
			Pembiayaan Neto	0,00	0,00	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul semula Rp 6.135.460.575,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 5.991.064.575,00 atau berkurang Rp 144.936.000,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran. Secara garis besar anggaran Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan, kenaikan pada hibah. Namun secara operasional mengalami penurunan karena *refocusing* anggaran dikarenakan menyesuaikan kebutuhan anggaran di tahun berjalan.

BAB II berisi:

A. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
B. *Strategi dan Arah Kebijakan*
C. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
D. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
E. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui tujuan;

“Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berpolitik Masyarakat”

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran Kesbangpol, yaitu meningkatnya ketahanan masyarakat, yang menjadi fokus kinerja perangkat daerah dalam memperkuat stabilitas sosial, mendorong partisipasi masyarakat yang berlandaskan nilai kebangsaan, serta menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek konflik sosial yang tertangani tahun 2026	Persen	88	89	90	91	92	93	93
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	75,39	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	80,25

Sumber data: Subbagian Perencanan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat (ASN, perangkat desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh difable, anak, dll)

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (ASN, perangkat desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh difable) serta Pemetaan Politik, Potensi Daerah, dan Potensi Kerawanan konflik
			Penguatan kapasitas ormas dan LSM
			Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
			Penguatan koordinasi, kerjasama dan networking/jejaring dengan TNI, Polri, Kejaksaan, PD terkait, Tim Pengumpul data dan informasi strategis, FKDM, BNK dan mitra kerja dlm penanganan konflik
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD

Sumber data: Subbagian Perencanan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya ketahanan masyarakat	**1.1**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**1.371.444.234**	**1.306.864.234**	**(64.580.000)**
	1.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter**		**1.371.444.234**	**1.306.864.234**	**(64.580.000)**
		1.1.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	172.845.000	154.185.000	(18.660.000)
		1.1.1.2	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaandan Purnapaskibraka	1.198.599.234	1.152.679.234,00	(45.920.000)
	1.2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**1.602.728.340**	**1.541.630.340**	**(61.098.000)**
	1.2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**1.602.728.340**	**1.541.630.340**	**(61.098.000)**
		1.2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	106.149.600	100.179.600	(5.970.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.496.578.740	1.441.450.740	(55.128.000)
	1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**45.085.000**	**63.505.000**	**18.420.000**
	1.3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**45.085.000**	**63.505.000**	**18.420.000**
		1.3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	45.085.000	63.505.000,00	18.420.000,00
	1.4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**317.113.800**	**404.913.800**	**87.800.000**
	1.4.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**317.113.800**	**404.913.800**	**87.800.000**
		1.4.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	317.113.800	404.913.800	87.800.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**458.873.700**	**423.697.700**	**35.176.000**
	1.5.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**458.873.700**	**423.697.700**	**35.176.000**
		1.5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.240.000	1.240.000	0
		1.5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48.385.000	47.685.000	700.000
		1.5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	234.614.000	209.138.000	25.476.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.014.900	32.014.900	0
		1.5.1.5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	142.619.800	133.619.800	9.000.000
	1.6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**151.695.000**	**97.265.000**	**(54.430.000)**
		1.6.1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**151.695.000**	**97.265.000**	**(54.430.000)**
		16.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	151.695.000	97.265.000	(54.430.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran				**3.946.940.074**	**3.837.876.074**	**(38.712.000)**

Sumber data: Subbagian Perencanan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	**1.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**2.176.727.901**	**2.070.455.901**	**(106.272.000)**
	1.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**82.813.900**	**83.413.900**	**600.000**
		1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.353.500	32.553.500	200.000
		1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.472.500	25.672.500	200.000

Sasaran Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	90.000	90.000	0
		1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	212.500	212.500	0
		1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	212.500	212.500	0
		1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.062.900	24.262.900	200.000
		1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000	410.000	0
	1.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1.707.838.741**	**1.708.038.741**	**200.000**
		1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.018.741	1.672.018.741	0
		1.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.325.000	1.325.000	0
		1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.495.000	34.695.000	200.000
	1.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**37.735.600**	**38.683.200**	947.600
		1.1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.735.600	38.683.200	947.600
	1.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**177.705.660**	**61.798.060**	**(115.907.600)**
		1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.215.660	4.215.660	0
		1.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.085.500	27.509.000	(576.500)
		1.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.882.600	4.882.600,00	0
		1.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.080.900	6.490.800	(590.100)
		1.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0
		1.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.241.000	17.500.000	(114.741.000)
	1.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80.464.000**	**83.652.000**	**3.188.000**
		1.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.385.000	33.585.000	200.000

Sasaran Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.204.000	45.192.000	2.988.000
		1.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.875.000	4.875.000	0
	1.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**90.170.000**	**94.870.000**	4.700.000
		1.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.600.000	67.300.000	4.700.000
		1.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.710.000	12.710.000	0
		1.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.860.000	8.860.000	0
		1.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000,00	0
Total Anggaran Pendukung				**2.176.727.901**	**2.070.455.901**	**(106.272.000)**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek konflik sosial yang tertangani 2026	Persen	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	80,20

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan target kinerja, *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek konflik sosial yang tertangani 2026	Persen	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	80,20

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.6 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.306.864.234,00	APBD
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.541.630.340,00	APBD
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	63.505.000,00	APBD
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	404.913.800,00	APBD
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	423.702.800,00	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	97.265.000,00	Dais
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.151.783.401,00	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, volume anggaran di dominasi adanya hibah bantuan keuangan Partai politik tahun 2025.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga .
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi .

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instumen Pendukung Capaian Kinerja pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)

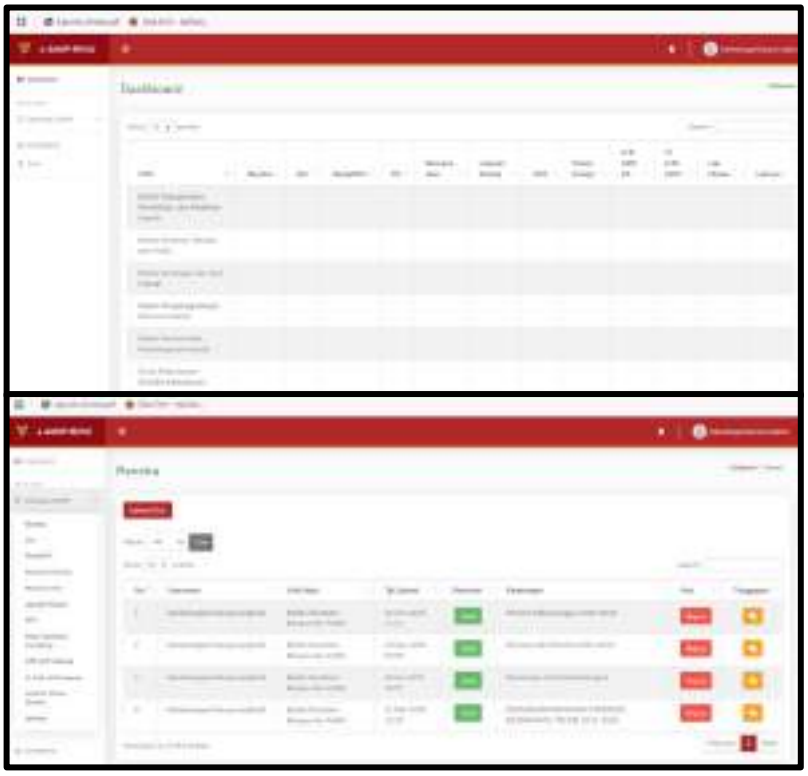

Gambar II.1. E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)

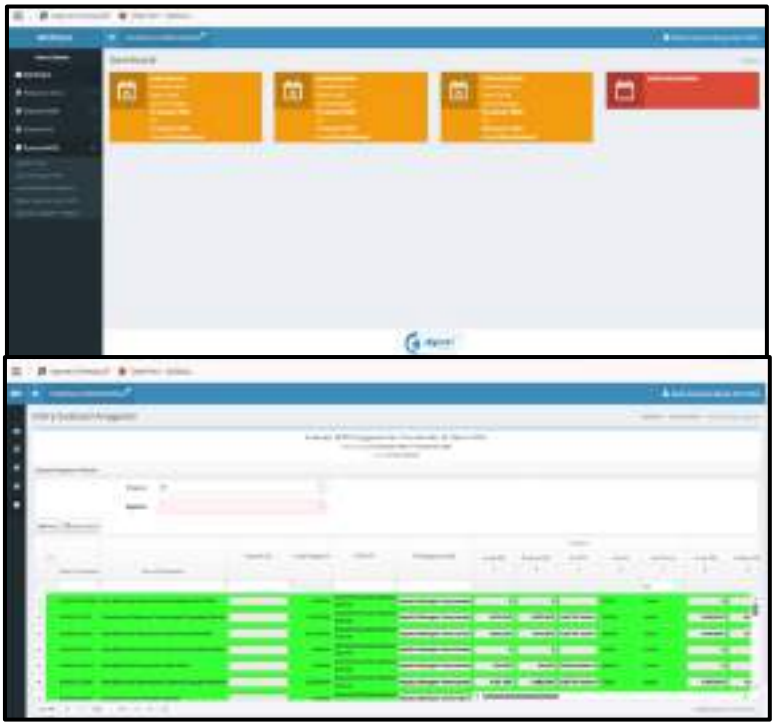

Gambar II.2. Sipanda

3. Instrumen pendukung dalam data ormas, pendaftaran ormas , dan dokumentasi dari organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kabupaten Gunungkidul, yakni Aplikasi Online Sistem Informasi Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan dan Organsisasi Politik (siapgaspol). Selain berfungsi untuk pendataan dan pendaftaran Ormas, aplikasi ini juga berperan dalam Pemberdayaan Ormas yang meliputi Sosialisasi Regulasi, Bimbingan Teknis dan Koordinasi, serta Pengawasan Ormas berupa pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

Gambar II.3. Siapgaspol

4. Media publikasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melalui Official Website Pemerintah melalui https://kesbangpol.gunungkidulkab.go.id :

Gambar II.4. kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

5. Media publikasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melalui Instagram: @kesbangpol.gk :

Gambar II.5. Instagram kesbang.gk

BAB III berisi:

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023
B. Capaian Kinerja Lainnya
C. Efisiensi Anggaran
D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persentase	111,11	100	100	100	100	Sangat Tinggi	93
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	skor	82,55	82,78	80,20	83,26	103,82	Sangat Tinggi	80,25

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya ketahanan masyarakat diukur dengan indikator Persentase konflik sosial yang tertangani jumlah konflik sosial yang tertangani. Penghitungan capaian mengunakan formulasi penghitungan sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	Konflik sosial adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. $\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$ Tipologi data: Non Kumulatif m

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran meningkatnya ketahanan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100 (14/14*100%)	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut capaian kinerja sebesar 100%, dengan kategori sangat tinggi yaitu realisasi 100% sesuai target yang ditetapkan. Hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa Indikator Persentase Konflik Sosial yang ditangani dalam wilayah telah mencapai target, dari target 100% realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Berdasarkan data yang ada di tahun 2025, dari 14 (empat belas) konflik sosial yang terjadi dapat tertangani semua sehingga realisasinya sebesar 100%.

Berdasarkan data historis tahun 2021-2025, realisasi angka persentase konflik masyarakat yang tertangani menunjukkan realisasi stabil seuai gambar III.3. Pada pada tahun 2021, realisasi persentase konflik masyarakat yang tertangani sebesar 100% dari 4 (empat) konflik yang terjadi tertangani semua. Sedangkan pada tahun 2022, ada 3 (tiga) konflik sosial yang terjadi dan dari 3 (tiga) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi disimpulkan penanganan konflik sosial 100%. Pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) konflik sosial yang terjadi dan dari 4 (empat) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga realisasinya konflik sosial yang terjadi 100%. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) konflik sosial yang terjadi dan dari 2 (dua) konflik tersebut dapat ditangani semua sehingga realisasinya 100%. Persentase konflik masyarakat yang tertangani dari data historis dari tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar III.1 Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7/8)
Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	93%	107,53%

Sesuai data di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% menjadi 100% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 100%, pada tahun 2024 menjadi 100% dan tahun 2025 100%, hal tersebut menunjukan konflik sosial yang terjadi dapat tertangani semua di tiap tahunnya.

Dari evaluasi data di atas terlihat bahwa realisasi kinerja stabil dikarenakan potensi konflik dapat tertangani. Konsistensi dan stabilitas kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100%. Capaian tersebut terwujud

dengan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan tersebut antara lain melalui peningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada; peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama; konflik sosial yang ditangani dalam wilayah; sekaligus nilai indeks kepuasan masyarakat yang meningkat. Capaian tersebut merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah daerah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim Penanganan Konflik Sosial dengan mitra kerja yaitu: *Forum Kerukunan Umat Beragama* (FKUB), *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat* (FKDM), *KDPD*, *Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan* (PPWK), *Forum Pembauran Kebangsaan* (FPK), dan *Badan Narkotika Kabupaten* (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Selain pembandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun, pembandingan capaian kinerja dengan OPD yang pada kabupaten/kota lain mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang lebih akurat. Berikut ini disajikan perbandingan indikator, target dan realisasi sasaran strategis dari OPD lain.

Tabel III.6 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis

No.	Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Target %	Realisasi %	% Realisasi Target
1	Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul	Meningkatnya Ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100*	100
2	Kesbangpol Kabupaten Kudus	Meningkatnya Harmoni Sosial	Potensi konflik sosial	100	100*	100
3	Kesbangpol Kabupaten Agam	Menjaga stabilitas keamanan masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	100	100*	100

Sumber: Bidang Kesatuan Bangsa
** https://kesbangpol.kuduskab.go.id/regulasi_file/Kinerja_1771997503.pdf*
https://ppid.agamkab.go.id/informasi/bjBIRzZ5M1JBQk9MYjB0L1dIOXhmZz09

Gambar III.2 Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul

Sumber : Subbidang Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target Sasaran masalah/kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun dengan indikator kinerja persentase konflik masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	∑ konflik sosial yang tertangani / ∑ konflik sosial yang terjadi x 100% Tipologi data: Non Kumulatif
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	∑ Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70 / ∑ Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan x 100% Tipologi data: Non komulatif
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	∑ Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70 / ∑ Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan x 100% Tipologi data: Non komulatif
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	∑ Jumlah Ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan / ∑ Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar x 100% Tipologi data: Non komulatif
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	∑ Jumlah penduduk yang mengikuti pemilu / ∑ Jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih x 100% Tipologi data: Non komulatif
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data: Non komulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Sasaran	Sasaran	**Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)**	Program		Indikator Kinerja Program	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Konflik sosial yang tertangani	111,11	2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5	100	121,21 Sangat Tinggi
			3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan	74	100	135,14 Sangat Tinggi
	Konflik sosial yang tertangani			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	95	95	100 Sangat Tinggi
			4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama	95	95	100 Sangat Tinggi
			5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	93	100	107,53 Sangat Tinggi
			6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	76	100	131,58 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						85,92	98,33	115,91 **Sangat Tinggi**

Capaian kinerja program pada Sasaran Konflik sosial yang tertangani rata-rata 115,91%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keenam program utama tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan OPD dan Instansi Vertikal dengan peserta dari unsur/kelompok masyarakat antara lain: Organisasi Kemasyarakatan, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, karangtaruna, kalangan pelajar, kelompok

Perempuan, dan sebagainya. Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran konflik sosial yang tertangani tersebut didukung dari :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari kegiatan**:

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terdiri atas beberapa antara lain:

a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 23 September 2025 di Kalirahan Baleharjo.
b) Pembinaan Wawasan Kebangsaan PPI, 29 Septmber 2025 di RR Handayani.
c) Pembinaan Wawasan Kebangsaan 9 Oktober 2025 di Kalurahan Kelor.
d) Pembinaan Wawasan Kebangsaan 22 Oktober 2025 di Kalurahan Bedoyo.
e) Pembinaan Wawasan Kebangsaan 15 Oktober di Kalurahan Semugih.
f) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan, 21 Oktober 2025 di padukuhan karangasem, Mulo
g) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan, 22 September 2025 di Kalurahan Duwet.

Tabel III.9 Kegiatan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2025

No	Hari/Tanggal	Acara
1	23 Januari 2025	Pembinaan KUB PIS di Kalurahan Bedoyo, Ponjong
2	13 Februari 2025	Pembinaan KUB PIS Kalurahan Karangwuni Kap. Rongkop
3	18 Februari 2025	Pembinaan KUB PIS Kal. Petir Kap. Rongkop
4	21 April 2025	Pembinaan KUB PIS di Kalurahan Jurangjero, Ngawen
5	22 April 2025	Pembinaan KUB FORKOPIMDA di RM Warung Simbok Bandung Playen
6	15 Mei 2025	Pembinaan KUB FORKOPIMDA di Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari
7	20 Mei 2025	Pembinaan KUB FORKOPIMDA di Kalurahan Monggol Kapanewon Saptosari

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat kegiatan seperti ditampilkan pada table di bawah ini:

Tabel III.10 Kegiatan P4GN Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	KET
1	Apel Sosialisasi P4GN	28 April 2025	SMKN 2 WONOSARI	
2	Apel Sosialisasi P4GN	11 Juni 2025	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO	
3	Apel Sosialisasi P4GN	16 Juni 2025	SMAN 1 PATUK	
4	Apel Sosialisasi P4GN	28 Juli 2025	SMKN 1 PONJONG	
5	Apel Sosialisasi P4GN	22 September 2025	SMAN 1 TANJUNGSARI	
6	Apel Sosialisasi P4GN	27 Oktober 2025	SMKN 1TEPUS	
7	Apel Sosialisasi P4GN	24 November 2025	SMKN 1 GEDANGSARI	

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan pembinaan bimtek pengadministrasian bantuan keuangan partai politik dan bimtek

laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. yang terdiri atas kegiatan:

Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2025

No	Nama	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	KET
1	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	19-02-2025	Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen	
2	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	10-06-2025	Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen	
3	Pendidikan Politik Masyarakat	17-06-2025	Kalurahan Watugajah Kapanewon Gedangsari	
4	Pendidikan Politik Masyarakat	25-06-2025	Kalurahan Kenteng Ponjong Kapanewon Ponjong	
5	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	10-07-2025	Kalurahan Bendungan Kapanewon Karangmojo	
6	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	15-07-2025	Kalurahan SIdorejo Ponjong	
7	Pokir Pendidikan Politik Masyarakat	24-07-2025	Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu	
8	Pendidikan Politik Masyarakat	13-08-2025	Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk	
9	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	26-08-2025	Kalurahan Karangduwet Kapanewon Paliyan	
10	Pendidikan Politik Masyarakat	08-09-2025	Kalurahan Banaran Kapanewon Playen	
11	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	10-09-2025	Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen	
12	Pendidikan Politik Masyarakat	23-09-2025	Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin	
13	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	15-10-2025	Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen	
14	Pembinaan Masyarakat	22-10-2025	Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo	
15	PIS Pendidikan Politik Masyarakat	25-11-2025	Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen	

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas kegiatan:

Tabel III.11 Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	KET
1	Penguatan Kapasitas Ormas	22-05-2025	RR Bhumikarta Sekretariat Daerah	
2	PIS Pembinaan Ormas	18-06-2025	Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen	
3	PIS Pembinaan Ormas	22-07-2025	Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen	
4	Kemitraan Ormas Bersama Pemerintah Daerah	20-08-2025	Ruang Rapat Bumikarta Sekretariat Daerah	
5	PIS Pembinaan Ormas	24-09-2025	Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen	
6	PIS Pembinaan Ormas	21-10-2025	Kalurahan Bedoyo Kapanewon Ponjong	

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan & LSM Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2025 tersebut diantaranya:

a) Anggota Korps Musik Bahana Gita Handayani Iringi Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025. Pada Selasa, 20 Mei 2025 upacara hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan di alun-alun wonosari. Wakil Bupati Gunungkidul bertindak selaku Inspektur Upacara memimpin jalannya upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Dalam kesempatan ini Korps Musik Bahana Gita Handayani ditugaskan untuk mengiringi upacara. Bertemakan ”Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”,

Gambar. III.3 Anggota Korsik Kabupaten Gunungkidul mengiringi upacara

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan urusan pemerintahan umum. Forum Gabungan Perangkat Daerah ini dilaksanakan pada 19 Februari 2025 di RM Sego Abang Kabupaten Gunungkidul. Peserta Forum Gabungan PD terdiri dari perwakilan Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, perwakilan beberapa Organisasi Masyarakat, mitra Satpol PP dan perwakilan pengguna layanan dari Badan Kesbangpol dan Satpol PP. Hadir dalam Forum Gabungan PD ini Perwakilan DPRD Kab. Gunungkidul, Kepala Satpol PP, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, perwakilan Rektor Universitas Gunungkidul, dan perwakilan dari Bappeda..

Gambar. III.4 Forum Gabungan Perangkat Daerah
dengan urusan pemerintahan umum

Sumber : Subbag. Umum Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rapat koordinasi Timdu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang di pimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang dihadiri oleh anggota tim diantaranya Kepala Kementerian Agama Gunungkidul, Perwakilan Polres Gunungkidul, Perwakilan Kodim 0730/Gunungkidul, Perwakilan Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Se-Kabupaten Gunungkidul. Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol menyampaikan bahwa jumlah ormas di Gunungkidul ada sekitar 216 Ormas dan selanjutnya mengajak untuk bersama-sama memantau Ormas yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kasi Intel Kejaksaan Gunungkidul menyampaikan bahwa kejaksaan sebagai pengawas kemitraan verifikasi dan peningkatan Kerjasama Pengawasan dilakukan jika Ormas ada yang melakukan pelanggaran hukum. Ormas di Gunungkidul cenderung kondusif. KBO Intelkam Polres Gunungkidul menyampaikan kerawanan yang ditimbulkan ormas yaitu konflik antar kelompok, tempat berkembangnya radikal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penipuan atau penggelapan dana, dan terjadinya intoleransi.

Gambar. III.5 Rakor Pendataan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa, 29 September 2025 di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi dihadiri oleh Polres Gunungkidul, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul, PPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Calon PPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Gambar. III.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi PPI Kabupaten Gunungkidul

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Apel Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) di SMK Muhammadiyah Karangmojo. Peserta apel dihadiri oleh kepala sekolah, bapak/ibu guru dan karyawan karyawati serta siswa-siswi SMK Muhammadiyah Karangmojo. Bertindak sebagai pembina apel Bupati Gunungkidul.

Gambar. III.7 Apel P4GN oleh Ketua BNK Gunungkidul

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Pendidikan Politik bertempat di Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen. Hadir dalam acara Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Sumarto, S.Pd,MM, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Deni Tri Utomo, S.Ag, dan Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Antok, S.Kom, MM., dan Peserta dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen.

Gambar. III.8 Pendidikan Politik Bersama Pemilih Pemula

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..

g) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada hari Kamis 10 Juli 2025 menyelenggarakan Pendidikan Politik Masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Sumarto, S.Pd, MM, Kepala Jawatan Keamanan Karangmojo Danis Satyargha, A.Md, Kom, Komisioner KPU Gunungkidul Irwan Budi S, S.Sos, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Retnoningsih, M.MPd, Lurah Bendungan Santoso, S.Sos dan peserta pendidikan politik masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan yang ada diwilayah Kalurahan Bendungan.

Gambar. III.9 Pendidikan Politik Masyarakat

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

h) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu 26 November 2025 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah. Hadir dalam acara tersebut , Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Panewu Se-

Kabupaten Gunungkidul, Kapolsek se-Kabupaten Gunungkidul, dan Danramil/Danposmil se-Kabupaten Gunungkidul.

Gambar. III.10 Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

i) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Kalurahan Plembutan Kapanewon Playen dengan mengusung tema Memperkuat Bela Negara dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda Kalurahan Plembutan. Turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Supriyani Astuti, S.Sos dan Sigit Subarno, S.AP.

Gambar. III.11 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

j) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tahapan seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yaitu seleksi PBB dan Kesamaptaan Bertempat di Gelanggang Olahraga Handayani.

Gambar. III.12 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

k) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tahapan kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Kegiatan ini bertempat di Gedung Kesenian Wonosari dan diikuti oleh 140an peserta dari berbagai SMA/SMK/MA se Kabupaten Gunungkidul yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi sebelumnya yaitu Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Intelegensia Umum. Dalam Tes Kesehatan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar. III.13 Seleksi Paskibraka Kab. Gunungkidul.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

l) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Aubade Paskibraka pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan peserta seluruh Paskibraka Kabupaten Gunungkidul dan Paskibraka Kapanewon Se-Kabupaten Gunungkidul. Dalam kegiatan ini hadir pula Forkopimda Kabupaten Gunungkidul, Kepala OPD Se-Kabupaten Gunungkidul, Panewu

Se-Kabupaten Gunungkidul, Kapolsek se Kabupaten Gunungkidul, dan Danramil se-Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat yang diberangkatkan oleh Bupati Gunugkidul. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 3 kilometer. Barisan paling depan adalah Paskibraka Kabupaten Gunungkidul yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul selanjutnya diikuti Paskibraka Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul bersama masing-masing pendamping. Barisan ditutup dengan rombongan Forkopimda Kabupaten Gunungkidul dan Kepala OPD. Pelaksanaan seremonial aubade dilaksanakan di Amphitheater Taman Budaya Gunungkidul yang diawali dengan penampilan dari Orchestra Hugo Violin dengan menampilkan lagu srikandi handayani serta lagu-lagu kebangsaan. Selain itu Paskibraka Kabupaten Gunungkidul juga menampilkan yel-yel yang selalu memberikan semangat kepada mereka untuk berjuang demi suksesnya upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Gambar. III.14 Aubade Paskibraka Kab. Gunungkidul.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

m) Pemusatan latihan dilaksanakan di SKB Gunungkidul, dengan diawali pembukaan desa bahagia yang dilaksanakan oleh wakil Bupati Gunungkidul yang diikuti 72 siswa capaskibraka dari perwakilan sekolah se Kab. Gunungkidul. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025.

Gambar. III.15 Pembukaan desa bahagia Paskibraka Kab. Gunungkidul.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambar. III.16 Latihan Paskibraka Kab. Gunungkidul.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang dilaksanakan di Bangsal Sewokoprojo pada Jumat, 15 Agustus 2025 siang. Upacara Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, S.E.,M.P. Turut hadir dalam acara tersebut Forkopimda, Kepala OPD serta orang tua/wali dari Paskibraka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Bupati Gunungkidul, mengukuhkan sebanyak 72 Paskibraka Kabupaten

Gunungkidul yang selanjutnya akan bertugas sebagai pengibar bendera pada Upacara Peringatan.

Gambar. III.17 Pengukuhan Paskibraka Kab. Gunungkidul

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

o) Pelaksanaan Upacara bendera 17 Agustus 2024 dan penurunan bendera.

Gambar. III.18 Pengibaran Bendera dan penuruna Bendera Upacara 17 Agustus oleh Paskibraka Kab. Gunungkidul.

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

p) Ramah Tamah Paskibraka 2025 Kab. Gunungkidul Bersama Gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2025

Gambar. III.19 Ramah Tamah paskibraka bersama gubernur DIY

Sumber : Bidang Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

q) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul bertempat di Limasan Calon Jamiatul Mudzakirin Shiddiqiyyah Ki Ageng Giring 1,7 Karangrejek, Wonosari,Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan silaturahmi bersama Warga Thoriqoh Shiddiqiyah dimana hadir Bupati Gunungkidul, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul,Ketua Majelis Ulama Indonesia , dan Warga Thoriqoh Shiddiqiyyah".

Gambar. III.20 Kemitraan Pembinaan Ormas

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

r) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan "Pengembaraan Kebangsaan" yang didanai oleh Dana Keistimewaan. Kegitan secara resmi dibuka dan dilepas oleh Wakil Bupati Gunungkidul, pada hari Selasa 09 September 2025. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan.. Pengembaraan Kebangsaan bertujuan untuk menanamkan kembali semangat kebangsaan untuk generasi muda.

Gambar. III.21 Pengembaraan Kebangsaan

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

s) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Sekolah Penggerak Kerukunan hari pertama yang bertembat di Aula Hotel Cyka Raya, Siraman, Wonosari pada hari Selasa, 24 Juni 2025. Kegiatan ini seluruhnya di danai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Adapun peserta kegiatan ini yaitu terdiri dari beberapa unsur organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Sekolah Penggerak Kerukunan ini merupakan angkatan ke V dari yang telah dilaksanakan sejak 2023 lalu, tujuan pelaksanaannya yakni untuk membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyatakat di Kabupaten Gunungkidul. Hadir mewakili Bupati Gunungkidul Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gunungkidul dr. Dewi Irawati, M.Kes., serta narasumber Ipda Santosa Hartana, S.H., KBO Sat Intelkam Polres Gunungkidul dan H. Supriyanto, S.Ag.,M.Si., Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Gambar. III.22 Sekolah penggerak Kerukunan

Sumber : Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
b. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.

c. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
d. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
b. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun dikalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan instansi dan lembaga terkait.
c. Memfokuskan pada memberdayakan FKUB, FKDM, PPWK, FPK, BNK dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/ masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa untuk lebih berperan dalam pencegahan konflik.
d. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat.
e. Menyasar pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dari berbagai macam kalangan masyarakat baik itu perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, anak-anak.
f. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauanya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

a. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
b. Koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul dengan forum-forum kemitraan, seperti FKUB, FPK, dan FKDM.
c. Adanya Perda maupun Pergub yang menguatkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Bakesbangpol Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel III.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,2	83,26	103,82%	Sangat Tinggi

Data di atas menunjukkan target yang ditetapkan sebesar 80,20 terealisasi 83,26 sehingga capaian kinerja sebesar 103,82%. Realisasi Nilai AKIP tahun 2025 menggunakan data hasil penilaian kualitas implementasi AKIP Bakesbangpol Tahun n-1. Dalam LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2024 telah melakukan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dalam Rangka Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.14 indak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Pohon kinerja belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah	Melakukan reviu Pohon kinerja dan menyusun kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah

Sumber data: Subbagian Perencanan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Realisasi Kinerja						Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	78,87	82,55	82,78	83,26	-	83	100,31

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2025
**) Nilai LKjIP tahun 2024*

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel III.17 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	103,82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	**100 Sangat Tinggi**

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Senin (17/11/2025). Penghargaan ini diberikan kepada beberapa daerah yang berpartisipasi aktif dan memenuhi target pengukuran IHaI, indikator strategis yang menilai tingkat harmoni sosial, toleransi, dan kohesi masyarakat. Sebagai momentum reflektif untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kerukunan nasional. Hal Ini mencerminkan peran aktif Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengukuran serta penguatan indeks harmoni di tingkat lokal. Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol pencapaian, tetapi juga pemicu untuk terus memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Gambar. III.24 Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Sumber : Subbag. Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul antara lain:

a. Kualitas sumberdaya yang perlu ditingkatkan
b. Kompetensi aparatur belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan
c. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan
d. Jalinan sinergitas Tupoksi antar bidang yang perlu diperkuat
e. Akses terhadap data dan informasi perlu ditingkatkan

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP
b. Maksimalkan pemanfaatan fasilitas pendukung kerja (sarana prasarana) serta anggaran yang ada dalam upaya menghadapi semakin kompleksnya permaslahan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara normatif sesuai peraturan perundangundangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

a. Jumlah sumber daya yang memadai
b. Komitmen pimpinan yang kuat dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa
c. Dukungan pengembangan Informasi dan Teknologi dan jaringan yang memadai

B. Capaian Kinerja Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 tidak mengampu kegiatan lain seperti SPM dan SDG's, karena berdasarkan tupoksinya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.8/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.989.664.575,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp5.989.664.575,00 atau 98,77%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp428.330.598,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Selisih	Efisiensi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**97.265.000**	**91.713.104**	**94,29**	**5.551.896**	**5,71**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	97.265.000	91.713.104	**94,29**	**5.551.896**	**5,71**
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**1.306.864.234**	**1.254.498.627**	**95,99**	**52.365.607**	**4,01**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.306.864.234	1.254.498.627	**95,99**	**52.365.607**	**4,01**

No.	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**		**1.541.630.340**	**1.528.730.150**	**99,16**	**12.900.190**	**0,84**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.541.630.340	1.528.730.150	**99,16**	**12.900.190**	**0,84**
	1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100.179.600	99.958.301	**99,78**	**221.299**	**0,22**
	2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.441.450.740	1.428.771.849	**99,12**	**12.678.891**	**0,88**
4	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**63.505.000**	**62.443.861**	**98,33**	**1.061.139**	**1,67**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		63.505.000	62.443.861	**98,33**	**1.061.139**	**1,67**

No.	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
5	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**		**404.913.800**	**401.519.001**	**99,16**	**3.394.799**	**0,84**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		404.913.800	401.519.001	**99,16**	**3.394.799**	**0,84**
6	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**		**423.702.800**	**400.690.635**	**94,57**	**23.012.165**	**5,43**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		423.702.800	400.690.635	**94,57**	**23.012.165**	**5,43**
	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.245.100	1.245.100	**100,00**	**0**	**0,00**
	2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.685.000	38.184.727	**80,08**	**9.500.273**	**19,92**
	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.138.000	206.426.183	**98,70**	**2.711.817**	**1,30**

No.	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.014.900	32.014.825	**100,00**	**75**	**0,00**
	5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	133.619.800	122.819.800	**91,92**	**10.800.000**	**8,08**
7	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**2.151.783.401**	**1.960.881.701**	**91,13**	**182.855.700**	**8,50**
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.201.400	92.010.470	96,65	3.190.930	3,35
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.708.038.741	1.542.177.790	90,29	165.860.951	9,71
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.683.200	37.339.610	96,53	1.343.590	3,47
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.798.060	58.290.390	94,32	3.507.670	5,68
	5	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.540.000	61.494.000			
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.652.000	76.839.477	91,86	6.812.523	8,14
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.870.000	92.729.964	97,74	2.140.036	2,26
Jumlah			5.989.664.575	5.700.477.079	**95,17**	**289.187.496**	**4,83**

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi
1.	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	3.837.881.174	3.739.595.378	97,44	98.285.796
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,2	83,26	103,82	2.151.783.401	1.960.881.701	91,13	190.901.700
Jumlah Belanja Total					5.989.664.575	5.700.477.079	95,17	289.187.496
Jumlah Belanja Program Utama					3.837.881.174	3.739.595.378	97,44	98.285.796
Jumlah Belanja Program Penunjang					2.151.783.401	1.960.881.701	91,13	190.901.700

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.18 di atas capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp5.989.664.575,00 terealisasi Rp5.700.477.079,00 atau 95,17% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 297.928.309,00 atau 4,97% yang bersumber dari:

- Laporan SPIP sudah tidak menggunakan Dokumen fisik, dan untuk Tahun 2025 tidak ada Evaluasi SOP sehingga tidak membuat Laporan Evaluasi Perjalanan Dinas Forkopimda pada Forkopimda tidak dapat mengikuti kegiatan, karena ada Ketugasan yang tidak bisa ditinggalkan.
- Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Menyesuaikan dengan surat permohonan kunjungan tamu.
- Pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, belanja modal komputer unit ini menggunakan metode pengadaan e-purchasing melalui sistem Ecatalog yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, adapun selisih dari sisa realisasi anggaran dikarenakan harga barang di sistem Ecatalog dibawah standar harga barang dan jasa (SHBJ) Tahun 2025.

- Pada sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, FGD Tematik tidak terlaksana karena Bupati Melakukan Cuti dalam rangka Pencalonan diri sebagai Kepala Daerah.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul misalnya aplikasi Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul (https://siapgaspol-kesbangpol.gunungkidulkab.go.id/)
3. Proyek Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gunungkidul dengan “Strategi Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Membangun Kerukunan di Kabupaten Gunungkidul tujuan akhirnya adalah untuk menjaga dan merawat kohesi sosial di Kabupaten Gunungkidul yaitu membangun, menjaga, dan merawat kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul atau lebih dikenal dengan sekolah penggerak kerukunan dengan dasar hukum Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Penggerak Kerukunan sebagai berikut :

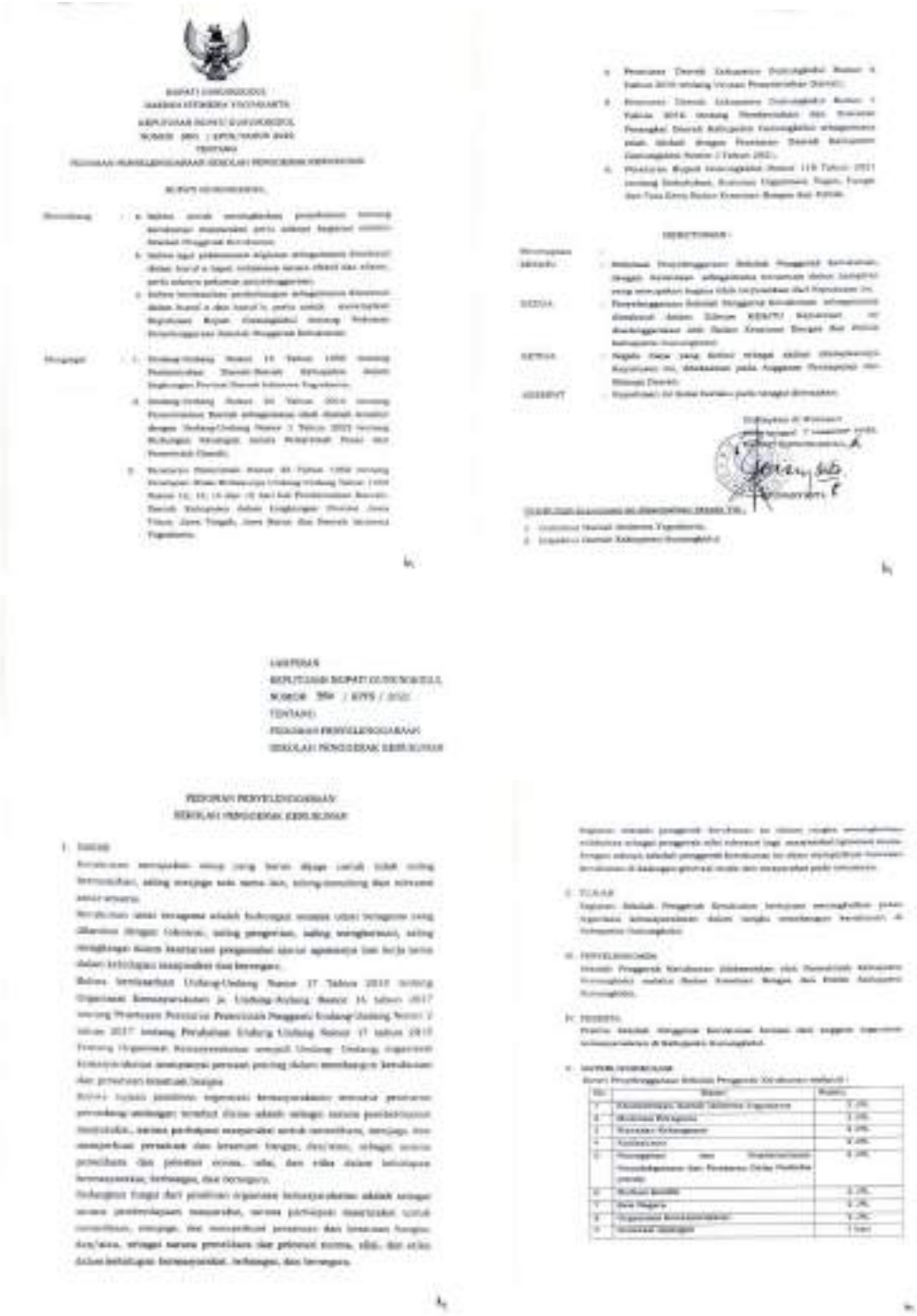

Sumber Data: Bidang Kesatuan Bangsa

Berikut Kegiatan pelaksanaan kegiatan Sekolah Pengerak Kerukunan pada tahun 2025:

Gambar. III.26 Sekolah Penggerak Kerukunan Kabupaten Gunungkidul

Sumber Data: Bidang Kesatuan Bangsa

a) Sekolah Penggerak Kerukunan yang diselenggarakan di di Aula Hotel Cyka Raya, Siraman, Wonosari. Acara tersebut diikuti oleh yang terdiri Perwakilan tokoh agama dan masyarakat di Gunungkidul, termasuk partisipasi dari organisasi masyarakat seperti LDII. Tujuan pelaksanaannya yakni untuk membangun persatuan dan kesatuan di Kabupaten Gunungkidul

BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:
A. *Kesimpulan*
B. *Langkah Perbaikan Kinerja*

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SDM yang masih belum mumpuni baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
2. Masih tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gunungkidul
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
4. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
5. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
6. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
7. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.
8. Keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara internal dan stakeholder terkait. Penguatan forum-forum kemitraan juga di lakukan dengan maksimal sesuai dengan ketugasan masing-masing.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
2. Peningkatan kualitas dan sinergitas program ketahanan nasional dengan melibatkan para pemangku kepentingan
3. Peningkatan fasilitas pendukung berbasis elektronik (website)
4. Melaksanakan program kegiatan Sinau Pancasila dengan materi 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika
5. Melaksanakan Pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus Partai Politik serta pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Daerah.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan supaya ormas dapat mengetahui dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mempunyai peningkatan kapasitas.
7. Melaksanakan program kegiatan melalui sosialisasi bahaya penggunan narkoba.
8. Melaksanakan program kegiatan melalui sosialisasi pencegahan terorisme.
9. Melaksanakan fasilitasi forum-forum kemitraan yang mendukung kondusivitas wilayah Gunungkidul (FKDM, FKUB, FPK).
10. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masyarakat.
11. Melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi daerah.

LAMPIRAN

1.Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya
2.Evaluasi LKjIP Tahun 2024
3.Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUNARYANTA	JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek Konflik Sosial yang tertangani tahun 2026	Persen	92

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	92
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,20

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.	151.695.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.258.055.401,00	APBD
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.371.444.234,00	APBD
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.602.728.340,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	45.085.000,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp.	317.113.800,00	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	458.878.800,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Pihak Kesatu

JOHAN EKO SUDARTO S,Sos,MH

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD AHSAN JIHADAN S.PSI, MA

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO S.Sos. MH

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu,
JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH	AHMAD AHSAN JIHADAN S.SPI, MA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,20

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.258.055.401,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

JOHAN EKO SUDARTO

Pihak Kesatu

AHMAD AHSAN JIHADAN S,SPI,MA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD AHSAN JIHADAN S.PSI,MA

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DIANA ESTI LESTARI S,Sos,MAP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
AHMAD AHSAN JIHADAN S.SPI,MA	DIANA ESTI LESTARI S,Sos, MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
		2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
		5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
		6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
		7.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294
		8.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
		9.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	94.191.400,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.707.838.741,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

AHMAD AHSAN JIHADAN

Pihak Kesatu

DIANA ESTI LESTARI S.Sos, MAP

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD AHSAN JIHADAN S.PSI, MA

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SULASTRI S,Sos

Jabatan : Kasubbag Umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
AHMAD AHSAN JIHADAN S,PSI,MA	SULASTRI S,Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8
		2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		4	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
		5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
		6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	350
		7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20
		8	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Unit	4
		9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
		11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		12	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	154
		13	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27
		14	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
		15	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20
		16	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	37.735.600,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	177.705.660,00	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	69.540.000,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	80.464.000,00	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	90.170.000,00	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	94.601.400,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

AHMAD AHSAN JIHADAN S,SPI,MA

Pihak Kesatu

SULASTRI S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANI ASYFIAH S,Sos,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO S.Sos. MH

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
JOHAN EKO SUDARTO S.Sos. MH	NANI ASYFIAH S,Sos,M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID KESATUAN BANGSA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1	Presentase konflik sosial yang diselesaikan dalam wilayah	Persen	92

	Program		Anggaraan	Keterangan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.371.444.234,00	APBD
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	317.113.800,00	APBD
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	458.878.800,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.	151.695.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH

Pihak Kesatu

NANI ASYFIAH S,Sos, M.SI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIESTIANI S.Sos
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bina Ideologi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH S.Sos M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
NANI ASYFIAH S,Sos,M.Si	LILIESTIANI S,Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA IDEOLOGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	390
		2	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	1

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.371.444.234,00	APBD
2.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp.	151.695.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

NANI ASYFIAH S.Sos M.Si

Pihak Kesatu

LILIESTIANI S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASIRAHAYU S.IP,MAP

Jabatan : Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH S,Sos M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
NANI ASYFIAH S,Sos M,Si	BASIRAHAYU S.IP,MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	662
		2	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	210
		3	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2
		4	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	317.113.800,00	APBD

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	1.245.100,00	APBD
	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	48.385.000,00	APBD
	- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	142.619.800,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
NANI ASYFIAH S.Sos,M.Si	BASIRAHAYU S.IP.MM

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI SRI RAHAYU

Jabatan : Ketua Tim Kerja Kerja Kewaspadaan Dini

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
NANI ASYFIAH S.Sos,M.Si	BUDI SRI RAHAYU

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KEWASPADAAN DINI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.195
		2	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	14

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	234.614.000,00	APBD
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	32.014.900,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

NANI ASYFIAH S.Sos,M,Si

Pihak Kesatu

BUDI SRI RAHAYU

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARTO S.Pd, MM

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH	SUMARTO S.Pd, MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1. Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	72

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.602.728.340,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	45.085.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

JOHAN EKO SUDARTO S,Sos,MH

Pihak Kesatu

SUMARTO S,Pd,MM

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDODO SH

Jabatan : Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMARTO S.Pd, MM

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUMARTO S.Pd, MM	WIDODO SH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	1.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	700
		2.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	20

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 1.602.728.340,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SUMARTO ,Pd,MM

Pihak Kesatu

WIDODO SH

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Bangsal Sewokoprojo, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURWO HANDOKO S.Sos, MM

Jabatan : Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMARTO S.Pd,MM

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUMARTO S.Pd, MM	PURWO HANDOKO S.Sos,MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat	1. Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	Orang	300

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 45.085.000,00	APBD

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
SUMARTO,S.Pd.MM	PURWO HANDOKO S.Sos, MM

RENCANA KERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	
Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	92
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,2

Wonosari, 6 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul

JOHAN EKO SUDARTO S.Sos,MH
NIP. 19710912 199101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH,S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH	JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Indek Konflik Sosial yang tertangani tahun 2026	Persen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,20

No	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 98.665.000,00	Dana Keistimewaan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.151.783.401,00	APBDP
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.306.864.234	APBDP
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.541.630.340	APBDP
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 63.505.000,00	APBDP
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp. 404.913.800,00	APBDP

No	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 423.702.800,00	APBDP

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu

JOHAN EKO SUDARTO S.Sos.MH

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARTO

Jabatan : Plh. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu,
JOHAN EKO SUDARTO	SUMARTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.151.783.401,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH

Pihak Kesatu

SUMARTO S.Pd, MM

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARTO

Jabatan : Plh. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DIANA ESTI LESTARI

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUMARTO	DIANA ESTI LESTARI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian konerja dan ikhtisar	6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	17
7	Telaksananya penerimaan gaji dan tunjangan ASN	7.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294
8	Tersedianya Lappporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9	Tersedianya jumlah Laporan Keungan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	9.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	95.201.400,00	APBD-P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.708.038.741,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

SUMARTO S.Pd, MM

Pihak Kesatu

DIANA ESTILESTARI S.Sos, MAP

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARTO

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SULASTRI

Jabatan : Kasubbag Umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUMARTO	SULASTRI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	Tersusunnya dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8
2	Terlaksanaya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan cap[aian konerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
3	Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor	3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
4	Tersedianya paket peralatan rumah tangga	4	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
5	Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
6	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan perundang-Undangan	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	350
7	Tersusunnyadokumen laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20
8	Tersedianya layanan peunjang urusan pemerintah daerah	8	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Unit	4
9	Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat	9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
10	Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
11	Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
12	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4
13	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	154
14	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27
15	Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	15	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
16	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	16	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20
17	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	38.683.200,00	APBD-P
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	61.798.060,00	APBD-P
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	69.540.000,00	APBD-P
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	83.652.000,00	APBD-P
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	94.870.000,00	APBD-P
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	410.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

SUMARTO, S.Pd,MM

Pihak Kesatu

SULASTRI S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANI ASYFIAH

Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
JOHAN EKO SUDARTO	NANI ASYFIAH

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID KESATUAN BANGSA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Terselesaikannya konflik Sosial yang terjadi dalam wilayah	1	Presentase konflik sosial yang diselesaikan dalam wilayah	Persen	92

	Program		Anggaraan	Keterangan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.306.864.234,00	APBD
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	404.913.800,00	APBD
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	423.702.800,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.	98.665.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
JOHAN EKO SUDARTO S.Sos, MH	NANI ASYFIAH S.Sos, M.SI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIESTIANI
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bina Ideologi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH
Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
NANI ASYFIAH	LILIESTIANI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA IDEOLOGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordiansi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	390
2	Tesedinya Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	1

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.306.864.234,00	APBD-P
2.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp.	98.665.000,00	Dana Keistimewaan

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

NANI ASYFIAH S.Sos M.Si

Pihak Kesatu

LILIESTIANI S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASIRAHAYU
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH
Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
NANI ASYFIAH	BASIRAHAYU

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Terlaksananya kegiatan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	662
	Terlaksanaya Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	210
	Tersedianaya dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2
	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 423.702.800,00	APBD-P

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			APBD-P
	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	1.245.100,00	APBD-P
	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	47.685.000,00	APBD-P
	- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	133.619.800,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

NANI ASYFIAH S.Sos.M.Si

Pihak Kesatu

BASIRAHAYU S.IP.MM

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CITRA CAHYANINGRUM
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kerja Kewaspadaan Dini

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NANI ASYFIAH
Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
NANI ASYFIAH	CITRA CAHYANINGRUM

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KEWASPADAAN DINI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.195
	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	14

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	209.138.000,00	APBD
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	32.014.900,00	APBD

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
NANI ASYFIAH S.Sos,M,Si	CITRA CAHYANINGRUM, S.M.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARTO

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JOHAN EKO SUDARTO

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
JOHAN EKO SUDARTO	SUMARTO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan dan pembangunan bagi Ormas dan LSM yang aktif	1.	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	Persen	74
2	Terlaksananya Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	Persen	82,5

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.441.450.740,00	APBD-P
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	63.505.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

JOHAN EKO SUDARTO S,Sos,MH

Pihak Kesatu

SUMARTO S,Pd,MM

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDODO

Jabatan : Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMARTO

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan lansung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUMARTO	WIDODO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Terlaksanayan Kegiatan BagiOrang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	700
	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	20

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 1.441.450.740,00	APBD

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

SUMARTO ,Pd,MM

Pihak Kesatu

WIDODO SH

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari,Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Posel :kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Lamankesbangpol.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURWO HANDOKO

Jabatan : Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUMARTO

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan lansung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 Suptember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
SUMARTO	PURWO HANDOKO

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Kegiatan bagi anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	1. Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	Orang	280

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 63.505.000,00	APBD-P

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

SUMARTO,S.Pd,MM

Pihak Kesatu

PURWO HANDOKO S.Sos, MM

RENCANA KERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	
Masalah/Kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,2

Wonosari, 1 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gunungkidul

JOHAN EKO SUDARTO
NIP 19710912 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Taman Bhakti 2B WonosariGunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posel :inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7 /Ev-LKj/13
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

b. menilai tingkat implementasi SAKIP;

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan

d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja

Predikat	Interpretasi
	baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

   Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

   Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring nomor 700.1.2.7/SKIP/32 tanggal 17 Juli 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 83,26 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" yaitu: terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,15	25,26
2. Pengukuran Kinerja	30	23,89	24,61
3. Pelaporan Kinerja	15	12,89	12,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,78	83,26
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan Kinerja**

   Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

   Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Pohon kinerja belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. **Pengukuran Kinerja**

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

3. **Pelaporan Kinerja**

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

   Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Mengevaluasi dan menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan.

2. Pengukuran Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

3. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:
1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 9 April 2025

Nomor : 700.1.21/0248/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut AKIP Bakesbangpol Kab. Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah
KabupatenGunungkidul di
Wonosari

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/13 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka dengan ini kami kirimkan rencana tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197109121991011001

Lampiran Surat
Nomor : 700.1.2.1/0248/2025.
Tanggal : 9 April 2025

NO	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	**PERENCANAAN KINERJA**		
a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	---	NIHIL
b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik	Pohon kinerja belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah	Akan di tindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan perbaikan penyusunan pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah
c.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	---	NIHIL
2.	**PENGUKURAN KINERJA**		
a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	---	NIHIL
b.	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	---	NIHIL

NO	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
c.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kenerja yang efektif dan efisien.	---	NIHIL
3	**PELAPORAN KINERJA**		
a.	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	---	NIHIL
b.	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar	---	NIHIL
c.	Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	---	NIHIL
4.	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**		
a.	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah Dilaksanakan	---	NIHIL
b.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	---	NIHIL
c	Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	---	NIHIL

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP 19710912199101100

POHON KINERJA BADAN KESBANGPOL